

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DKI Diminta Cocokkan Data Warga Miskin

◆ Bantuan Rp7,77 Triliun Tepat Sasaran

JAKARTA (Poskota) - DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mensinkronisasi data warga miskin secara berkala berkala. Pasalnya, anggaran yang disiapkan sebesar Rp7,77 triliun sesuai Raperda APBD tahun anggaran 2024 harus terserap dengan baik.

Diketahui, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, hingga saat ini ada sebanyak 5,2 juta orang tercatat sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data itu, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran Rp 7,77 triliun untuk menangani kemiskinan di Ibu Kota.

Dimana program itu, menjadi salah satu dari enam program prioritas yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk dibahas dan

didalami DPRD DKI Jakarta.

"Ketepatan sasaran itu faktor yang sangat penting. Masyarakat yang masuk kategori miskin belum tentu tiga atau empat bulan lagi masih di kategori tersebut," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, yang dikutip Senin (30/10).

Anggara mengakui bahwa data 5,2 juta jiwa warga masuk kategori miskin itu merupakan jumlah yang sangat besar dan perlu identifikasi ulang untuk mengetahui jumlah yang akurat. Karena itu, ia pun ia mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta untuk terus melakukan sinkronisasi data penduduk miskin secara berkala, agar pemberian bantuan tepat sasaran.

Anggara menyampaikan, anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp7,77 triliun dalam Raper-

da APBD tahun 2024 merupakan akumulasi dari tiga program jaminan sosial yang ada di Dinas Sosial. Yakni untuk program Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

Anggara pun berharap Dinas Sosial terus meningkatkan sinergitas kerja bersama jajaran UKPD di tingkat wilayah sampai laporan RT dan RW, juga memanfaatkan peran kader lingkungan. "Jadi pemandu paduan data, perbaikan data berkala itu sangat penting sebelum melakukan evaluasi-evaluasi bantuan sosial yang kita berikan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data terhadap para penerima jaminan sosial.

"Agar tepat sasaran

berdasarkan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Penanganan Fakir miskin yaitu ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," kata dia.

Premi menjelaskan, dari verifikasi dan validasi yang dilakukan sejauh ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 1,1 juta orang dari 5,2 juta yang berdasarkan DTKS berstatus miskin.

"Kalau dari data DTKS, itu yang saat ini kita lakukan verifikasi dan validasi lapangan, dan disana kita temukan ada 1,1 juta orang yang sudah tidak layak mendapatkan Bansos. Inilah yang kami keluarkan dari penerima Bansos. Total anggaran yang kami siapkan tahun 2024 Rp700 miliar untuk semua jenis Bansos baik kategori anak, lansia, maupun disabilitas," tutup Premi. (*/lfn)